

SUMMARY

Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Agung Nomor 1428 K/PDT/2006 Mengenai Pembatalan Putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi Terhadap Perkawinan Yang Dilakukan Diluar Negeri Tanpa Dicatatkan Di Indonesia Dan Perkawinan yang Sah Menurut Agama Namun Di

Created by SYAFARUDDIN

Subject : Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Agung Nomor 1428 K/PDT/2006

Subject Alt : Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Agung Nomor 1428 K/PDT/2006

Keyword : Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Agung Nomor 1428 K/PDT/2006

Description :

Untuk melangsungkan perkawinan, kedua calon suami-istri harus menghadap sendiri di muka pegawai catatan sipil Akan tetapi pada zaman sekarang ini banyak yang melakukan pernikahan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan tanpa melakukan pencatatan dengan berbagai macam alasan, seperti : kurangnya pengetahuan anggota masyarakat setempat, atau disebabkan pembiayaan pendaftaran pencatatan yang tidak terjangkau masyarakat, atau lokasi Kantor Urusan Agama atau Kantor Catatan Sipil yang jauh dari tempat tinggal orang bersangkutan, atau karena alasan lainnya. Menyimak dari contoh di atas yang begitu kompleks, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian yang tuntas ke dalam bentuk penulisan skripsi dengan judul : “Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Agung Nomor 1428K/PDT/2006 Mengenai Pembatalan Putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi terhadap Perkawinan yang Dilakukan di luar Negeri tanpa Dicatatkan Di Indonesia dan Perkawinan yang sudah sah menurut Agama Namun Diikuti dengan Pemalsuan Dokumen Pencatatan Nikah”. Adapun yang menjadi pokok permasalahan pada skripsi ini diantaranya sebagai berikut: Bagaimana syarat sah perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pencatatan pernikahan di Negara Indonesia ? Bagaimana akibat hukum terlambatnya pendaftaran perkawinan yang dilakukan di luar Negeri dan status perkawinan pasca putusan Mahkamah Agung ? (studi kasus atas putusan Mahkamah Agung Nomor 1428 k/pdt/2006) Dalam penyusunan skripsi ini, metode penelitian yang dipakai adalah dengan pendekatan normatif yaitu dengan melakukan penelitian dari bahan pustaka dan studi dokumen. Pencatatan Perkawinan dalam pelaksanaannya diatur dengan PP. No. 9 Tahun 1975 dan Peraturan Menteri Agama No. 3 dan 4 Tahun 1975. Bab II pasal 2 ayat (1) PP No. 9 Tahun 1975, Pencatatan Perkawinan dari mereka yang melangsungkannya menurut Agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. 32 Tahun 1954 Pencatatan Perkawinan atau pernikahan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sudah sesuai dengan ketentuan dan Perundang-undangan yang berlaku, khusus bagi non-muslim di catat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sedangkan bagi yang muslim di Catatkan di KUA (Kantor Urusan Agama) kecamatan.

Date Create : 24/10/2013

Type : Text

Format : PDF

Language : Indonesian

Identifier : UEU-Undergraduate-2009-41-080

Collection : 2009-41-080

Source : Perpustakaan Esa Unggul

Relation Collection Universitas Esa Unggul

COverage : Sivitas Akademika Universitas Esa Unggul

Right : Copyright @2013 by UEU Library

Full file - Member Only

If You want to view FullText...Please Register as MEMBER

Contact Person :

Astrid Chrisafi (mutiaraadinda@yahoo.com)

Thank You,

Astrid (astrid.chrisafi@esaunggul.ac.id)

Supervisor